

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Amy Y.S. Rahayu, Vishnu Juwono, Krisna Puji Rahmayanti, "Pelayanan Publik Dan E-Government Sebuah Teori dan Konsep" Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

Agus dwiyanto, "Good Governance melalui Pelayanan Publik", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008.

_____, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Dr. H. Zaenal Mukarom, M.Si., Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., *Manajemen Pelayanan Publik*, Cet I, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Dr. Hardiayansyah, M.si., "Kualitas Pelayanan Publik" Cet. 1, Gava Media, yogyakarta, 2018.

Sigit Supto Nugroho, S.H., M.Hum, Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Cet I, Lakeisha, Klaten, 2021.

E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet VI, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1963.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

H. Waller en J.H Waller-Hunter, *Milieuwetgeving en Planning in Indonesia, Milieu en Recht*, Januari, 1984, hlm. 5 dikutip oleh Siti Sundary Rangkuti, "Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional", Surabaya, Airlangga University Press, 2005

Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha*, Cv. Dian Anugerah Prakasa, Edisi.II, 2008.

I Nyoman Trisantosa, Dewi Kurniasih, Musa Hubeis, *Pelayanan Publik Berbasis Digital*, Depublish, 2022.

- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, 2020.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2008,
- Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kelima, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*, Bandung, PT.Grafindo Media Pratama, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Sondang P. Siagian, *"Administrasi Pembangunan"*, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Winardi, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Weinata Sairin, *Identitas dan Ciri Khas Pendidikan di Indonesia antara Konseptual dan Operasional*, Gunung Mulia, 2006.
- Wasis, Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengatahuan Alam*, PT.Gramedia, Jakarta, 2008.

B. Jurnal/Artikel

- Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah ini tidak dipublikasikan. hlm 1 dikutip pada Skripsi M. Panca Kurniawan. 2016, Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (Bpmp) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata. Universitas Lampung (<https://digilib.unila.ac.id/>).
- Andri Trisna, M.Usman Maliki, Nurul Hikma, *"Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS)"*. Jurnal Manajemen, Vol 10 No. 3, Juli 2022
- Agung Nurrahman, Jamilah Rahman, *Efektivitas Sicanik Cloud pada pelayanan publik perizinan berbasis E-Government di kabupaten purwakarta*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.3 No. 2 Tahun 2021, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>.

Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak dan Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Makalah ini tidak dipublikasikan. Jakarta, 1995.

Fitria, "Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah", *Jurnal Hukum*, Vol 7 No 3 Tahun 2014. Innovative. <https://online-jurnal.unja.ac.id/jimih/article/view/2176>.

Fuji Puspita Rahayu, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)", *ejournal Administrasi Publik*, Vol 9 No.3 Tahun 2021. ejournal.ap.fisip-unimal.org

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77 mengutip Philipus M. Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Perizinan.

I Gede Pantja Astawa, "Hubungan Fungsional Antara Hukum Administrasi Negara dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup" dan pelaksanaannya dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara", UII Press, Yogyakarta, Cet. Ke-2 November 2002.

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitus Sa'adah, "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Jurnal Nomor 2*, 2019.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, "Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah", Makalah. Surabaya, November 2001

Rizal Bahroni, Margaretha Rumbakwan, Arwanto Harimas Ginting, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (OSS RBA)", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol 12, No. 1 Tahun 2022.

Suhanadji, *Modernisasi Dan Globalisasi, Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, Penerbit Insan Cendikia, Bandung, 2004.

Ulber Silalahi dan Wirman Syafri, "Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel", IPDN Press, Cetakan Pertama, Sumedang, 2015.

C. Internet

Badan Legislasi. *Konsep Perizinan Usaha Berbasis Risiko Perlu Diterapkan*. 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29398/Konsep+Perizinan+Usaha+Berbasis+Risiko+Perlu+Diterapkan>.

[https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-Mengenal Pelayanan Publik](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-Mengenal-Pelayanan-Publik), 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/optika>, 2022

<https://arogapopin.ac.id/index>.2023

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan Lembaran negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan perubahan terklahir UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 dan Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6215)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia No.15, 2021 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)